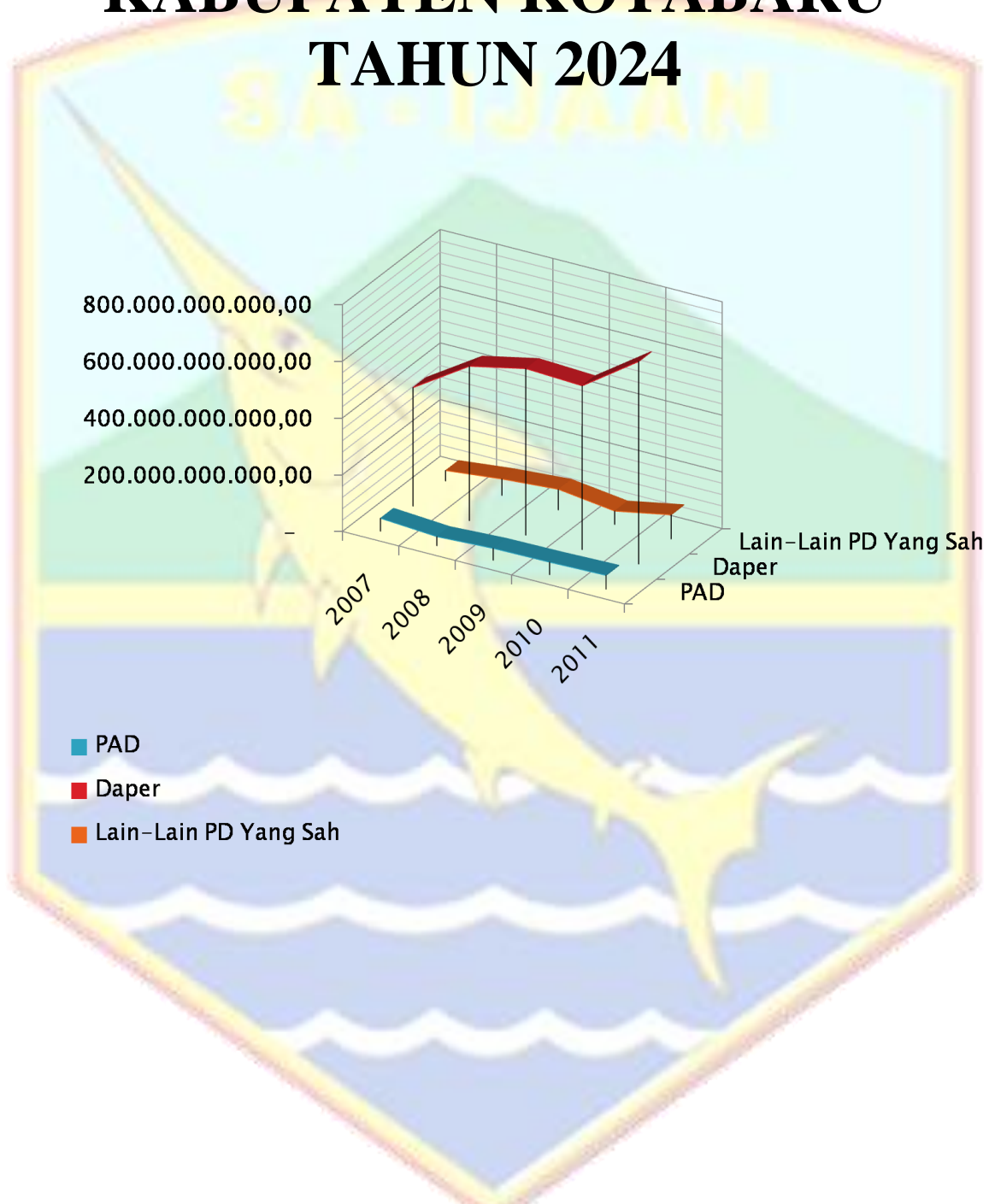


PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Dokumen Penetapan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru ini bersubstansi dari hasil evaluasi kegiatan tahun lalu dan perencanaan kegiatan tahun ini sampai dengan 2 (dua) tahun yang akan datang yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA).

Realisasi Capaian kinerja tahun 2022 yang di sajikan, dapat dijadikan perbandingan dimana menjadi acun penyusunan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024, untuk menentukan kegiatan selanjutnya.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun berjalan menggunakan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024. sebagai pedoman pelaksanaan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru.

Dengan disusunnya dokumen Penetapan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 ini sebagai akuntabilitas kinerja, diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan untuk membangun daerah yang lebih baik menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kotabaru, Desember 2023
Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotabaru,

KHAIRIAN ANSHARI, S.STP, M.Si
Pembina UtamaMuda (IV/c)
NIP: 19830216 200112 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk satu periode satu tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

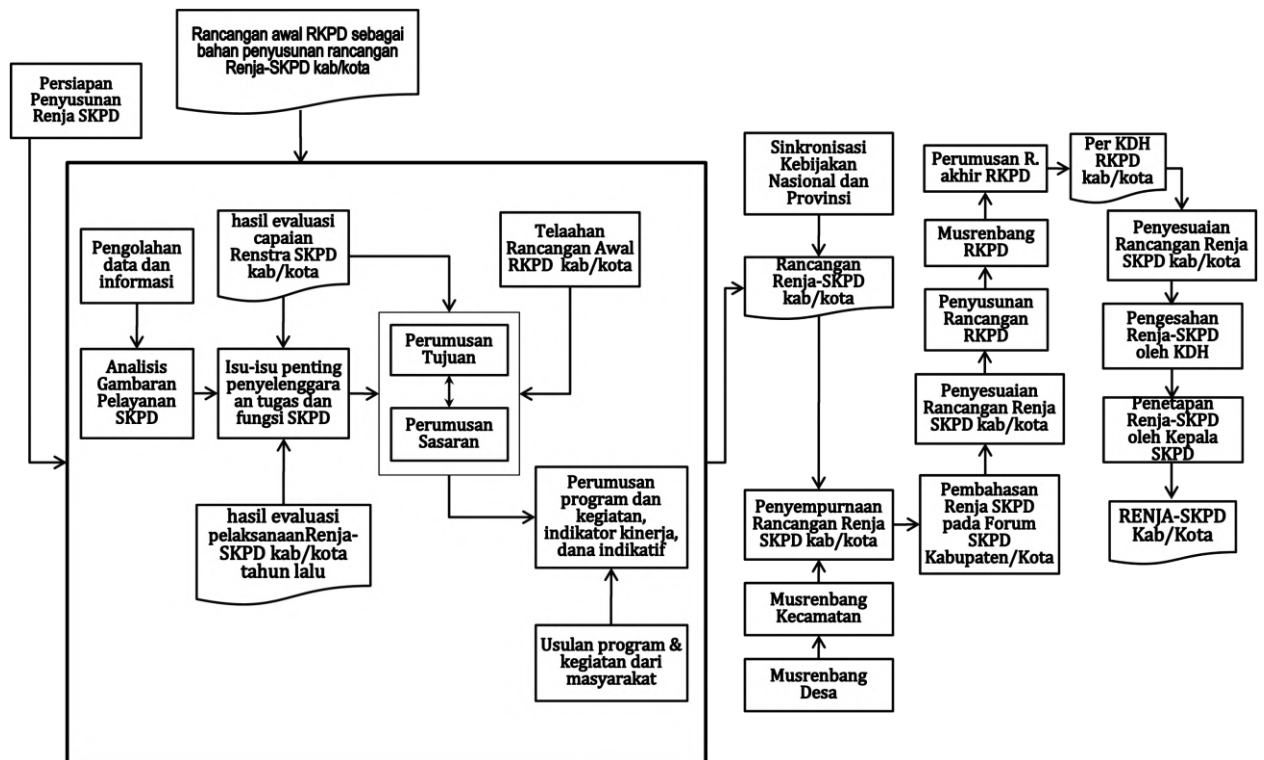
Penetapan Rencana Kerja (RENJA) yaitu penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA), dan dalam hal ini mengacu pada RENSTRA. RENJA dibuat untuk perencanaan tahun berikutnya, yang terdiri dari kegiatan dan pendanaan untuk Tahun 2024, serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan acuan agar kegiatan selanjutnya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penetapan Renja Perangkat Daerah yang disusun untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Setelah tahap tersebut, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan forum Perangkat Daerah dan penetapan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam Penetapan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.

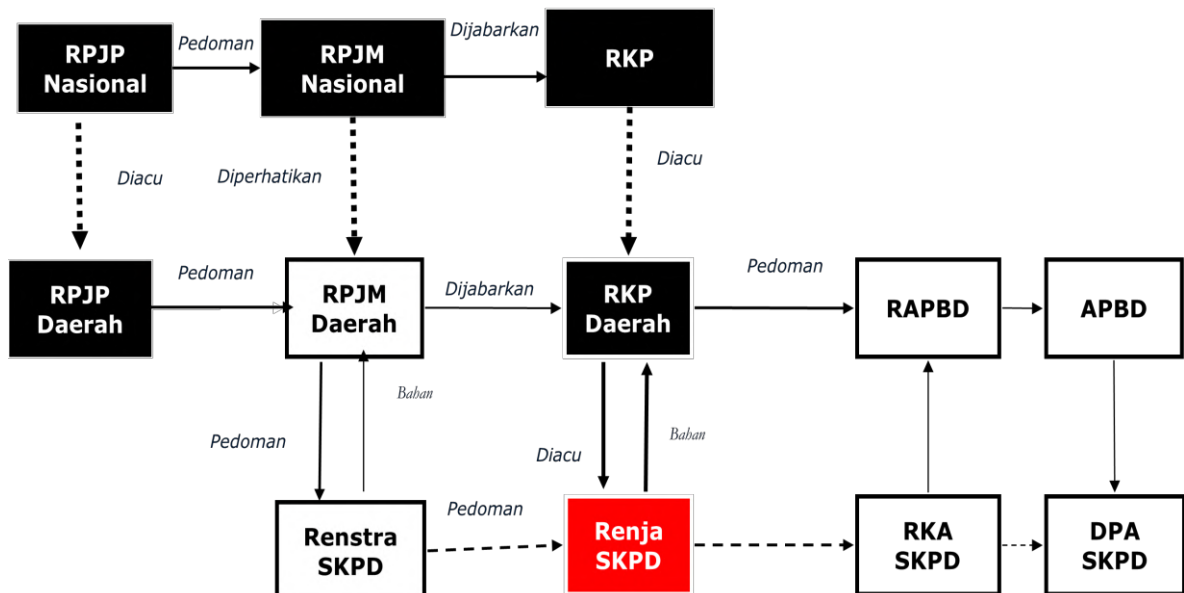
Sedangkan Rancangan RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan RKPD. Pada akhirnya RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.

Adapun Bagan alir tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat dari bagan berikut ini.



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Sedangkan Keterkaitan Renja dengan dokumen lainnya dapat dilihat dari bagan berikut ini.



Gambar 1.2. Bagan Keterkaitan Renja

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah; Mencabut sebagian Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/Pmk.07/2010, Nomor : 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21);
41. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 40);
42. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 45 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran;
43. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel;
44. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Sarang Burung Walet;
45. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 53 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
46. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 56 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah;
47. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 66 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;
48. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 67 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
49. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
50. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 08 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

51. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
52. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
53. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
54. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
55. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir;
56. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
57. Perubahan Nomor 31 Tahun 2014 atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Kotabaru;
58. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021;
59. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 64);
60. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 80);
61. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi

Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 29);

62. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 91);
63. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor.....Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah :

1. Sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung maupun tidak langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
2. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran kedepan.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi tolak ukur pada kegiatan tahun selanjutnya.

Adapun Tujuan Penetapan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah :

1. Untuk memudahkan dalam penyusunan Anggaran pada masing-masing Program
2. Untuk mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien
3. Dapat menetapkan target dalam indikator kinerja yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
4. Merupakan tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, dan pengorganisasian program untuk kegiatan pelayanan Badan Pendapatan Daerah sesuai Tupoksinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Sistematika penulisan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

Bab ini telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH BAPENDA KABUPATEN KOTABARU TAHUN LALU

Untuk Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru belum terbentuk sehingga untuk Review Evaluasinya masih menggunakan Review Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan. Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru telah melakukan kegiatan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Pada APBD Tahun Anggaran 2022, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru melaksanakan 3 program dengan 49 Sub kegiatan, dengan Anggaran Belanja Daerah setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 20.623.045.161,00 terdiri dari Belanja Operasi Rp. 16.940.085.379,00 dan Belanja Modal Rp. 1.634.414.170,00 dimana Realisasi Keuangan mencapai 90,07% dan Capaian Kinerja tahun 2022 sebesar 99,98%.

Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra s/d tahun 2022 Kabupaten Kotabaru

Nama PD :
Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	target capaian kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program / kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	- Dokumen	15 Dokumen	60,00%
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Kali Koordinasi	4 Kali Koordinasi	2 Kali Koordinasi	2 Kali Koordinasi	100%	- Kali Koordinasi	6 Kali Koordinasi	60,00%

5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10	Kali Koordinasi	4	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	100%	-	Kali Koordinasi	6	Kali Koordinasi	60,00%
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10	Kali Koordinasi	4	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	100%	-	Kali Koordinasi	6	Kali Koordinasi	60,00%
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10	Kali Koordinasi	4	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	100%	-	Kali Koordinasi	6	Kali Koordinasi	60,00%
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	-	Dokumen	12	Dokumen	60,00%
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60	Dokumen	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	-	Dokumen	36	Dokumen	60,00%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65	Kali Penyediaan	26	Kali Penyediaan	13	Kali Penyediaan	13	Kali Penyediaan	100%	-	Kali Penyediaan	39	Kali Penyediaan	60,00%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	Kali Pembayaran	24	Kali Pembayaran	12	Kali Pembayaran	12	Kali Pembayaran	100%	-	Kali Pembayaran	36	Kali Pembayaran	60,00%
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	Kali Pelaksanaan	24	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	12	Kali Pelaksanaan	100%	-	Kali Pelaksanaan	36	Kali Pelaksanaan	60,00%

5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	1	Kali Koordinasi	1	Kali Koordinasi	100%	-	Kali Koordinasi	3	Kali Koordinasi	60,00%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Kali Koordinasi	2	Kali Koordinasi	1	Kali Koordinasi	1	Kali Koordinasi	100%	-	Kali Koordinasi	3	Kali Koordinasi	60,00%
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10	Dokumen	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	-	Dokumen	6	Dokumen	60,00%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	20	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	-	Dokumen	12	Dokumen	60,00%
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	-	Dokumen	3	Dokumen	60,00%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60	Kali Pendataan	20	Kali Pendataan	12	Kali Pendataan	8	Kali Pendataan	67%	-	Kali Pendataan	28	Kali Pendataan	46,67%
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	60	Kali Koordinasi	23	Kali Koordinasi	12	Kali Koordinasi	11	Kali Koordinasi	92%	3	Kali Koordinasi	37	Kali Koordinasi	61,67%
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60	Kali Monitoring	22	Kali Monitoring	12	Kali Monitoring	10	Kali Monitoring	83%	3	Kali Monitoring	35	Kali Monitoring	58,33%

5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Kali Pelaksaan	8	Kali Pelaksaan	4	Kali Pelaksaan	4	Kali Pelaksaan	100%	1	Kali Pelaksaan	13	Kali Pelaksaan	65,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Kali Penyediaan	4	Kali Penyediaan	4	Kali Penyediaan	4	Kali Penyediaan	100%	-	Kali Penyediaan	8	Kali Penyediaan	40,00%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Kali Penyediaan	24	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	100%	-	Kali Penyediaan	36	Kali Penyediaan	60,00%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	Kali Penyediaan	24	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	100%	-	Kali Penyediaan	36	Kali Penyediaan	60,00%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60	Kali Penyediaan	24	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	100%	-	Kali Penyediaan	36	Kali Penyediaan	60,00%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	180	Kali	72	Kali	36	Kali	36	Kali	100%	-	Kali	108	Kali	60,00%
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	30	Kali Penyediaan	6	Kali Penyediaan	6	Kali Penyediaan	6	Kali Penyediaan	100%	-	Kali Penyediaan	12	Kali Penyediaan	40,00%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360	Orang Kali	144	Orang Kali	72	Orang Kali	72	Orang Kali	100%	-	Orang Kali	216	Orang Kali	60,00%

5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 Dokumen	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	- Dokumen	36 Dokumen	60,00%
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20 Kali Pelaksanaan	8 Kali Pelaksanaan	4 Kali Pelaksanaan	4 Kali Pelaksanaan	100%	- Kali Pelaksanaan	12 Kali Pelaksanaan	60,00%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang diadakan	3 Paket	- Paket	1 Paket	1 Paket	100%	- Paket	1 Paket	33,33%
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25 Paket	- Paket	4 Paket	4 Paket	100%	- Paket	4 Paket	16,00%
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000 Lembar	2.396 Lembar	1.200 Lembar	1.200 Lembar	100%	- Lembar	3.596 Lembar	59,93%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720 Kali Pembayaran	282 Kali Pembayaran	144 Kali Pembayaran	144 Kali Pembayaran	100%	- Kali Pembayaran	426 Kali Pembayaran	59,17%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Kali Penyediaan	24 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	12 Kali Penyediaan	100%	- Kali Penyediaan	36 Kali Penyediaan	60,00%

5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120 Unit	47 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	- Unit	71 Unit	59,17%
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60 Kali Pemeliharaan	22 Kali Pemeliharaan	- Kali Pemeliharaan	- Kali Pemeliharaan	#DIV/0!	- Kali Pemeliharaan	22 Kali Pemeliharaan	36,67%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Kali Pelaksanaan	4 Kali Pelaksanaan	- Kali Pelaksanaan	- Kali Pelaksanaan	#DIV/0!	- Kali Pelaksanaan	4 Kali Pelaksanaan	26,67%
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55 Kali	21 Kali	11 Kali	11 Kali	100%	- Kali	32 Kali	58,18%

5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah										
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60Laporan	24Laporan	12Laporan	12Laporan	100%	-Laporan	36Laporan	60,00%	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										
5.02.04.2.02	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah										
5.02.04.2.02.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah/rancangan peraturan bupati tentang pajak dan retribusi daerah, Jumlah kajian PAD yang dilaksanakan dan Jumlah Kerjasama Penggalan Potensi PAD	457Dokumen dan 2 Kali Kegiatan	187Dokumen dan 2 Kali Kegiatan	97Dokumen dan 2 Kali Kegiatan	97Dokumen dan 2 Kali Kegiatan	100%	-7Dokumen dan 2 Kali Kegiatan	277Dokumen dan 2 Kali Kegiatan	60,00%	
5.02.04.2.02.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Publikasi Peraturan Bupati tentang pajak dan retribusi daerah, dan Jumlah pengawasan, pembinaan dan sosialisasi pajak dan retribusi daerah	655 Kali Pengawasan, 3 Kali Publikasi dan 5 Kali Sosialisasi	255 Kali Pengawasan, 3 Kali Publikasi dan 5 Kali Sosialisasi	135 Kali Pengawasan, 3 Kali Publikasi dan 5 Kali Sosialisasi	125 Kali Pengawasan, 3 Kali Publikasi dan 5 Kali Sosialisasi	92%	-5 Kali Pengawasan, 3 Kali Publikasi dan 5 Kali Sosialisasi	375 Kali Pengawasan, 3 Kali Publikasi dan 5 Kali Sosialisasi	56,92%	

5.02.04.2.02.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah data potensi, wajib pajak, retribusi daerah yg valid dan update, serta sarana dan prasarana yang memadai	65	12 Dokum en dan 1 Kali Pemeli haraan	26	12 Dokume n dan 1 Kali Pemelih araan	13	12 Dokum en dan 1 Kali Pemeli haraan	13	12 Dokum en dan 1 Kali Pemeli haraan	100%	-	12 Dokum en dan 1 Kali Pemeli haraan	39	12 Dokum en dan 1 Kali Pemeli haraan	60,00%
5.02.04.2.02.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data potensi Objek Pajak	7.500	Objek Pajak	2.997	Objek Pajak	2.000	Objek Pajak	2.000	Objek Pajak	100%	-	Objek Pajak	4.997	Objek Pajak	66,63%
5.02.04.2.02.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah data objek pajak yang valid dan update dan Terbayarnya Hutang Kepada Pihak Ke 3	7.500	1000 Objek Pajak dan 1 Kali Terbay arnya Hutang	2.997	1000 Objek Pajak dan 1 Kali Terbay arnya Hutang	2.000	1000 Objek Pajak dan 1 Kali Terbay arnya Hutang	2.000	1000 Objek Pajak dan 1 Kali Terbay arnya Hutang	100%	-	1000 Objek Pajak dan 1 Kali Terbay arnya Hutang	4.997	1000 Objek Pajak dan 1 Kali Terbay arnya Hutang	66,63%
5.02.04.2.02.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah penilaian objek pajak	7.500	Objek Pajak	2.990	Objek Pajak	1.500	Objek Pajak	1.500	Objek Pajak	100%	-	Objek Pajak	4.490	Objek Pajak	59,87%
5.02.04.2.02.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan dan penetapan atas wajib pajak yang telah diterbitkan	60	Dokum en	24	Dokume n	12	Dokum en	12	Dokum en	100%	-	Dokum en	36	Dokum en	60,00%
5.02.04.2.02.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diterbitkan sesuai standar	60	Dokum en	24	Dokume n	12	Dokum en	12	Dokum en	100%	-	Dokum en	36	Dokum en	60,00%
5.02.04.2.02.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen data potensi objek pajak daerah yang valid dan update	60	Dokum en	24	Dokume n	12	Dokum en	12	Dokum en	100%	-	Dokum en	36	Dokum en	60,00%

5.02.04.2.02.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang di tagih dan di tindak	225	Wajib Pajak	89	Wajib Pajak	45	Wajib Pajak	45	Wajib Pajak	100%	-	Wajib Pajak	134	Wajib Pajak	59,56%
5.02.04.2.02.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen keberatan dan permohonan keringatan pajak yang ditangani	60	Dokumen	23	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	-	Dokumen	35	Dokumen	58,33%
5.02.04.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen optimalisasi target penerimaan retribusi daerah yang akurat	20	Dokumen	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100%	-	Dokumen	12	Dokumen	60,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru seperti tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

No.	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun (n) 2023	Tahun (n+1) 2024	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah			6,00%	6,00%	6,00%	7,00%	41,90%	7,85%	100,00 %	100,00 %	
5	Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan			8,23%	8,37%	8,47%	8,67%	12,63%	12,09%	100,00 %	100,00 %	
6	Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	139,01 %	113,08 %	100,00 %	100,00 %	

*Data sementara untuk
tahun 2022

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

Peran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yaitu dalam Perumusan, penetapan kebijakan teknis dan operasional, penyelenggaraan, pelayanan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dalam bidang pendapatan asli daerah. Maka, sangat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaannya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi tentunya menghadapi kendala-kendala yang harus diminimalisir dengan kekuatan dan peluang baik dari internal dan eksternal. Berikut dapat dilihat dalam pendekatan analisis SWOT, yaitu :

1. Lingkungan Internal

Analisis kekuatan yang dimiliki yaitu :

- a. Tersedianya laporan keuangan pendapatan daerah sebagai bahan evaluasi pertanggungjawaban keuangan dan referensi pengambilan kebijakan
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Adanya Peraturan Daerah tentang wajib pajak dan retribusi sebagai dasar hukum pemungutan pajak
- 2) Adanya dasar hukum dan ketentuan-ketentuan lain sebagai pelaksanaan tugas
- 3) Kondisi daerah yang kondusif

b. Tantangan

- 1) Kondisi strata social yang bervariasi
- 2) Pengalihan pengelolaan PBB menjadi Pajak Daerah
- 3) Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat

c. Kelemahan

- 1) Kurangnya kesadaran para Wajib Pajak
- 2) Kurangnya tenaga aparatur pengelolaan pelayanan pada masyarakat
- 3) Belum maksimalnya sosialisasi pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajakdaerah.

4) Belum maksimalnya pengelolaan piutang dan validasi data PBB

Dari beberapa faktor lingkungan internal dan eksternal di interaksikan sebagai berikut :

1. Interaksi Peluang-Kekuatan (PKt)

- a. Motivasi SDM di bidang pelayanan pendapatan daerah yang didukung Peraturan Daerah dan dasar hukum akan mendorong kesadaran para wajib pajak dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Adanya kebijakan dan program peningkatan pelayanan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber – sumber pendapatan daerah akan menunjang percepatan pengembangan dan pengembangan daerah.
- c. Terciptanya system informasi keuangan dan pendapatan daerah secara transparansi, akuntabel secara cepat dan terkendali.
- d. Peningkatan pelayanan masyarakat yang didukung ketersediaan sarana prasarana dan kondisi daerah relative kondusif akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Interaksi Peluang-Kelemahan (PKI)

- a. Adanya Peraturan Daerah tentang wajib pajak dan retribusi sebagai dasar hukum pemungutan pajak untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Regulasi dan kebijakan yang konsisten disertai ketersediaan anggaran yang memadai memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Mewujudkan visi dan misi merupakan kewajiban dan komitmen yang harus dilaksanakan secara konsekuen.

3. Interaksi Tantangan – Kekuatan (TKt)

- a. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan tersedianya saran dan prasarana pelayanan
- b. Pengelolaan PBB menjadi pajak daerah yang didukung SDM yang berkualitas dan profesional dalam bidang pelayanan
- c. Adanya SDM berkompetensi dalam rangka mengantisipasi kurangnya kesadaran para wajib pajak.

4. Interaksi Tantangan-Kelemahan (TKI)

- a. Kurangnya tenaga aparaturnya dalam rangka optimalisasi pelayanan pada masyarakat
- b. Dalam rangka mengantisipasi kesadaran wajib pajak dengan melalui door to door kepada wajib pajak
- c. Belum maksimalnya sosialisasi tentang pengalihan pengelolaan PBB menjadi pajak daerah.
- d. Belum maksimalnya validasi data PBB yang akurat.

Data dan Informasi perencanaan yang mudah diakses membantu masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada Rancangan awal RKPD, proses usulan program, kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan masih usulan yang belum bersifat final. Ini masih harus dianalisa lagi untuk mengidentifikasi sejauh mana kebutuhan yang benar-benar dirasa *urgent* di tahun anggaran 2023 sesuai dengan usulan RKPD yang telah termuat.

Secara garis besar setelah melakukan analisa seperti yang tercantum dalam Tabel 2.4 tidak terdapat banyak perubahan. Ini mungkin dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru yang fungsi pelayanan utamanya adalah sebagai Perangkat Daerah Pendapatan, tidak banyak bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan fisik yang *notabene* adalah hasil penjangkauan aspirasi masyarakat, tapi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru usulan yang ada sejak semula adalah hasil dari usulan unit-unit kerja dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru. Berikut disampaikan Tabel 2.4 yang merupakan *Review* terhadap rancangan awal RKPD.

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	KEUANGAN				21.857.370.300	KEUANGAN				21.857.370.300	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.441.446.500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.441.446.500	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				293.709.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				293.686.296	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10 Dokumen	152.152.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	10 Dokumen	152.152.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 dokumen	75.755.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 dokumen	75.748.112	

3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 dokumen	65.802.500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 dokumen	65.787.366	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.146.591.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.376.032.900
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	14 kali	9.364.505.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	14 kali	9.593.947.000	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 kali	542.446.900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 kali	542.446.900	
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 kali	187.046.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 kali	187.046.500	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	1 Laporan	15.348.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	1 Laporan	15.348.500	

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Laporan	20.499.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Laporan	20.499.000	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	2 Dokumen	16.745.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	2 Dokumen	16.745.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					258.800.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					294.480.335
10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	1 Paket	60.850.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	1 Paket	97.850.000	
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 Dokumen	18.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 Dokumen	17.987.729	
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 Dokumen	20.500.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 Dokumen	20.499.746	

13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 Dokumen	17.050.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	4 Dokumen	17.030.050	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	2 Kali Orang	22.155.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	2 Kali Orang	20.807.810	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	20 Orang	120.245.600	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	20 Orang	120.305.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.288.103.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.176.764.005
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	3 Paket	95.679.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	3 Paket	85.670.000	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Paket	134.760.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Paket	134.734.813	

18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Paket	245.667.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Paket	145.000.000	
19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Paket	86.800.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Paket	86.784.192	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Kali	15.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Kali	15.585.000	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	6 Kali	36.576.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	6 Kali	36.000.000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85 Orang Kali	520.145.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	85 Orang Kali	520.145.000	

23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Dokumen	27.845.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Dokumen	27.845.000	
24	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Dokumen	125.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kotabaru	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	12 Dokumen	125.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.345.800.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					1.210.800.000
25	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Mebel	2 Paket	300.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Mebel	2 Unit	245.000.000	
26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Paket	445.800.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	415.800.000	
27	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	350.000.000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	320.000.000	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	250.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotabaru	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	230.000.000	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				639.448.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				639.405.652	
29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1200 Kali	6.300.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1200 Kali	6.287.500	
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144 Kali Penyediaan	174.998.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144 Kali Penyediaan	175.000.000	
31	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Kali	52.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Kali	52.500.000	
32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	405.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kotabaru	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	405.618.152	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				468.993.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				450.191.436	

33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotabaru	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	15 Unit	183.393.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kotabaru	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	15 Unit	183.391.436	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotabaru	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2 Unit	260.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kotabaru	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	2 Unit	241.200.000	
35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotabaru	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	10 Unit	25.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kotabaru	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	10 Unit	25.600.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					245.300.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					245.300.000
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					245.300.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					245.300.000

36	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kotabaru	Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	12 Dokumen	245.300.000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kotabaru	Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	12 Dokumen	245.300.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.170.623.800	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.170.623.800
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					7.170.623.800	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah					7.170.623.800
37	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	2 Dokumen	301.825.000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	2 Dokumen	301.825.000	
38	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	4 Dokumen	824.300.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	4 Dokumen	824.300.000	
39	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	485.870.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	485.870.000	

40	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	3 Unit	878.821.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	3 Unit	878.821.500	
41	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	424.485.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	424.485.000	
42	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	720.382.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	720.382.000	
43	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	1000 Obyek Pajak	897.112.500	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	1000 Obyek Pajak	897.112.500	
44	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	233.125.800	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	233.125.800	
45	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	584.060.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	584.060.000	

46	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	214.542.000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	214.542.000	
47	Penagihan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	357.936.000	Penagihan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	357.936.000	
48	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	277.091.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	277.091.000	
49	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	250.000.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Dokumen	250.000.000	
50	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	206.073.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	12 Laporan	206.073.000	
51	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	4 Laporan	515.000.000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kotabaru	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	4 Laporan	515.000.000	

Dari Musrembang Kecamatan yang telah dilaksanakan sebelumnya tahun 2023. Berikut adalah tabel tentang usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023.

Tabel 2.5
Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat
Kabupaten Kotabaru
Tahun 2024

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan Tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan nasional dan daerah, sehingga program dan kegiatan dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Telaahan kebijakan nasional dikaitkan RPJMD 2021-2026.

Prioritas nasional berdasarkan ringkasan eksekutif RPJMD 2021 - 2026

- 1 . Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi

No.	Indikator Kinerja	Sasaran pada PD provinsi	Sasaran pada kementerian keuangan RI
(1)	(2)	(4)	
1.1.1	Rasio antara realisasi pendapatan daerah terhadap target pendapatan daerah	Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemda	Tingkat pendapatan yang optimal
2.1.1	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemda	Tingkat kepatuhan wajib pajak,kepabeaan dan cukai yang tinggi
2.1.2	Pelayanan Prima	Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemda	Terlaksananya penatausahaan kekayaan Negara yang handal dan akuntabel
3.1.1	Menurunnya Piutang Pajak	Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemda	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang .Dalam konteks ketata negaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokrasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola

pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai isum berdaya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pendapatan Negara dan sekaligus dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan investasi melalui kebijakan keharmonisasi tarif dan pemberian insentif berupa stimulus perpajakan. Kondisi perdagangan Indonesia di tingkat regional maupun bilateral membawa peluang untuk meningkatkan volume perdagangan melalui FTA, melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan Tarif Khusus, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri, melindungi produk dalam negeri melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian insentif berupa stimulus perpajakan. Upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemberian insentif kepada program konversi penggunaan BBM untuk listrik kepenggunaan energi terbarukan khususnya energi panas bumi (geothermal energy).

Disisi internal ketidakpastian juga terlihat dari adanya gejolak di pasar saham dan keuangan, belum bergerakinya sektor riil secara optimal dan musibah bencana alam yang melanda di berbagai daerah di Indonesia menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas pengelolaan kebijakan fiskal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan penjabaran dari misi yang tercantum pada Renstra Tahun 2021-2026 dan berorientasi pada upaya peningkatan di segala aspek bidang pendukung perencanaan pembangunan yaitu yang terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Tahun Ke	
					2023	2024
1	2	3	4		7	8
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Bapenda Meningkatnya Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. (Kemandirian Fiskal)	1. Rasio Pertumbuhan Pendaptan Asli Daerah 2. Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan 3. Perentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Target Pendapatan Asli Daerah	% % %	6,00% 8,47% 100,00%	7,00% 8,67% 100,00%

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2021 -2026. Pada dasarnya Rencana Kerja tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra), Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru maupun kegiatan-kegiatan spesifik Badan Pendapatan Daerah sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru kepada masyarakat

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Cat ata n Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16,368,732,615				14.354.390.900
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				293,377,818				293.709.500
1	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	10 Dokumen	152,043,818	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	152.152.000
2	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	75,588,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	75.755.000
3	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Laporan	65,746,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	65.802.500

	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,727,642,592				10.146.591.300
4	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	14 Bulan	11,909,181,033	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		14 Bulan	9.364.505.400
5	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	634,244,985	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	542.446.900
6	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	169,003,901	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		12 Dokumen	187.046.500
7	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	1 Laporan	7,207,331	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	15.348.500
8	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Laporan	4,475,542	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	20.499.000
9	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	2 Dokumen	3,529,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	16.745.000

	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					266,882,500				258.800.600
10	5.02.01.2.05.03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	1 Paket	70,620,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	60.850.000
11	5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	17,898,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	18.000.000
12	5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	20,282,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	20.500.000
13	5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	17,024,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Dokumen	17.050.000
14	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	2 Kali Orang	20,753,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Kali Orang	22.155.000
15	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	20 Orang	120.305.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Orang	120.245.600
	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,266,446,111				1.226.848.000
16	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	3 Paket	39,864,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Paket	35.000.000

17	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Paket	134,701,593	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	134.760.500
18	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Paket	248,130,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	245.667.000
19	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Paket	86,694,192	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Paket	86.800.500
20	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Kali	15.585.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Kali	15.630.000
21	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	6 Kali	35,961,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Kali	36.000.000
22	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	85 Orang Kali	520,109,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		85 Orang Kali	520.145.000
23	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	27,840,412	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	27.845.000
24	5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	157,560,514	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Dokumen	125.000.000

	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				826,343,498				1.330.000.000
25	5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Kab. Kotabaru	2 Paket	208,603,500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	300.000.000
26	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kotabaru	2 Paket	207,799,998	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Paket	430.000.000
27	5.02.01.2.07.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	2 Unit	219,460,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit	350.000.000
28	5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kotabaru	1 Unit	190,480,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	250.000.000
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				711,772,764				639.448.000
29	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru	1200 Kali	6.287.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1200 Kali	6.300.000
30	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru	144 Kali Penyediaan	193,927,540	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		144 Kali Penyediaan	174.998.000
31	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru	12 Kali	52.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Kali	52.500.000

32	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kotabaru	12 Laporan	459,558,724	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	12 Laporan	405.650.000
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				276,267,332			458.993.500
33	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Kotabaru	15 Unit	183.391.436	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	15 Unit	183.393.500
34	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Kotabaru	2 Unit	67,305,896	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2 Unit	250.000.000
35	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Kab. Kotabaru	10 Unit	25.570.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 Unit	25.600.000
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				345.300.000			245.300.000
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				345.300.000			245.300.000
36	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya yang dapat direalisasikan	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	345.300.000	Dana Insentif Daerah	12 Dokumen	245.300.000

	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				7,066,556,098				7.149.962.800
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				7,066,556,098				7.170.623.800
37	5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	2 Dokumen	301.826.600	Dana Insentif Daerah		2 Dokumen	305.000.000
38	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	4 Dokumen	724,299,550	Dana Insentif Daerah		4 Dokumen	800.464.000
39	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Laporan	466,575,000	Dana Insentif Daerah		12 Laporan	485.870.000
40	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	3 Unit	878.821.650	Dana Insentif Daerah		3 Unit	878.821.500
41	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Laporan	424.485.000	Dana Insentif Daerah		12 Laporan	424.485.000
42	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Laporan	720.361.000	Dana Insentif Daerah		12 Laporan	720.382.000
43	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	1000 Obyek Pajak	912,363,050	Dana Insentif Daerah		1000 Obyek Pajak	897.112.500
44	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	233.125.000	Dana Insentif Daerah		12 Dokumen	233.125.800

45	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Laporan	584.059.700	Dana Insentif Daerah		12 Laporan	584.060.000
46	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	214.541.650	Dana Insentif Daerah		12 Dokumen	214.542.000
47	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	357.935.698	Dana Insentif Daerah		12 Dokumen	357.936.000
48	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	277.090.650	Dana Insentif Daerah		12 Dokumen	277.091.000
49	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Dokumen	250.001.000	Dana Insentif Daerah		12 Dokumen	250.000.000
50	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	12 Laporan	206.072.550	Dana Insentif Daerah		12 Laporan	206.073.000
51	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Realisasi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	Kab. Kotabaru	4 Laporan	515.000.000	Dana Insentif Daerah		4 Laporan	515.000.000
TOTAL						23,780,588,713			21.749.653.700	

